

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Juli 2019 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
49	LANU MUHAMMAD ALJAWWAD (lanu.xxxxxxxx)	Yth Pak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo,, Untuk mendukung pemberantasan KKN secara menyeluruh, mohon bantuannya khususnya di Kabupaten Jepara dan umumnya di seluruh area Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, banyak Pegawai Honorer Pemerintahan adalah saudara/kerabat dari pemangku jabatan pemerintahan dan/ataupun titipan dari pegawai ASN/PNS itu sendiri, boleh dicek/diadakan survei siapa pegawai Honorer pemerintahan yang tidak mempunyai hubungan tertentu dengan pejabat pemerintahan,, hal ini tentunya bertolak belakang untuk memberantas KKN secara menyeluruh khususnya Nepotisme. Dan belum lagi nanti tuntutan dari Pegawai Honorer jika sudah lama mengabdikan mereka akan meminta untuk diangkat sebagai ASN, padahal jika ingin menjadi ASN bila lewat seleksi Nasional (CAT) ini perjuangannya sangat-sangat berat dan sulit, yang harus bersaing dengan ribuan peserta lainnya. Jika memang Pegawai Honorer masih dibutuhkan untuk bekerja dalam pemerintahan, kami harapkan sebagai masyarakat biasa, bahwa kebutuhan Pegawai honorer dibuat secara transparan dan sistem penerimaan/seleksinya dibuat seperti penerimaan CPNS/ASN secara Nasional agar pemerintahan bisa benar-benar bersih dari KKN, mendapat pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan membuat pemerintahan di suatu daerah semakin maju, serta kami sebagai	05-07-2019 09:43	Terima Kasih laporan diteruskan ke bidang yang menanganiTerimakasih laporannya, Terkait laporan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : a. Tenaga Honorer Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006; b. Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari	Laporan Selesai

50	Jerry Wungkana (No Telepon)	<p>Saya ingin melaporkan salah satu oknum PNS di lingkungan Pemprov Jateng. Saya cukup terusik dengan postingan yang bersangkutan di akun FBnya. Sebagai sesama PNS, saya diajari untuk tidak bergaya hidup mewah (sesuai dengan butir2 Pancasila tentunya) dan saya yakin hal yang sama juga didapatkan yang bersangkutan. Namun, dengan postingan yang bersangkutan (ada di gambar screenshot), saya bertanya2 apakah tidak melanggar etika PNS jika kita memposting barang2 mewah dan bermerek (bahkan juga dicantumkan kuitansinya beserta komentar yang seakan-akan dia tidak peduli jika dikatakan sombong)? Bukankah ini berpotensi memberikan justifikasi bagi kepada masyarakat untuk berperilaku yang sama? Oleh karena itu, saya mohon kepada Pemprov Jateng untuk dapat memberikan sedikit teguran kepada yang bersangkutan.</p>	05-07-2019 23:24	<p>terimakasih laporannya diteruskan ke bidang yang menangani mohon dapat di sampaikan data via email bkd@jatengprov.go.id atau via WA di 08112777346 untuk tindak lanjut</p>	Laporan Selesai
51	abdur rahman (No Telepon)	<p>tentang status pensiun atas nama IIS AMAH, S.Hut., M.A (Pegawai DLHK provinsi JAWA TENGAH). Surat Keputusan pensiun sudah keluar, cuman uang pensiun nya kok belum masuk ke rekening. Mohon bantuannya.</p>	17-07-2019 14:04	<p>Njih Kami koordinasikan dengan DLHK njih Njih kami koordinasikan dulu dg DLHK, karena yg lebih tahu dari DLHK, kalo boleh minta no kontak njenengan kirim ke WA kami 08112777346</p>	Laporan Selesai

52	Dyah Dwie (No Telepon)	<p>lapor pak gub,saya minta tolong agar pak gubernur segera menindak lanjuti perselingkuhan di kalangan PNS(pegawai negeri sipil),soalnya saya dan anak saya sudah menjadi korban perselingkuhan suami saya dengan atasannya seorang wanita PNS.suami saya bekerja sebagai sopir dinas pariwisata kab semarang tepatnya di daerah ungaran,dia sudah hampir 10 bulan ga pernah pulang ke rumah karena ketahuan berselingkuh dengan atasannya seorang Wanita PNS,dulu wanita PNS tersebut juga tugas di dinas pariwisata kab semarang dengan jabatan sebagai seksi usaha jasa pariwisata..bahkan wanita PNS tersebut juga sering mengancam saya mau menjebloskan saya ke penjara kalau saya sampai lapor ke BKD/kepala dinas pariwisata setempat.dengan alasan sudah mengganggu privasi dia.suami saya juga mengancam mau membunuh saya kalau saya sampai datang ke kantor pariwisata.saya meminta tolong langsung kepada bapak gubernur dengan harapan agar bapak gubernur segera menindak lanjuti dan menindak tegas oknum oknum Pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat tapi malah membuat resah dan merugikan rakyat kecil.melalui aplikasi lapor gub ini saya sangat berharap semoga bapak gubernur segera menindak lanjuti laporan saya agar supaya tidak ada rakyat kecil yang menjadi korban perselingkuhan oknum oknum pemerintahan</p>	19-07-2019 12:15	<p>Njih Terimakasih Laporannya, akan kami koordinasikan dengan BKD Kab Semarang Sudah kami teruskan ke BKD Kab Semarang dengan Sekretaris, tolong Nomor Kontak Anda dapat dikirim ke Email bkd@jatengprov.go.id atau WA 08112777346</p>	Laporan Selesai
----	------------------------	---	---------------------	---	-----------------

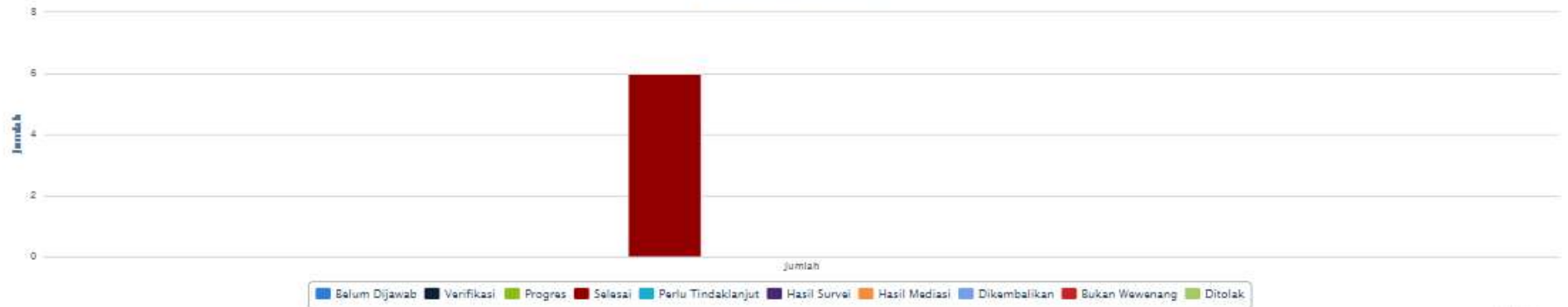
53	unul unul (No Telepon)	Yth. bpk. Ganjar Pranowo mohon ijin saya alumni pascasarjana UGM sudah lulus talent pool tahun 2015 tapi sampai masa berlaku sudah mau habis belum juga dapat promosi jabatan sedangkan yang baru lulus sdh dapat promosi jabatan, tolong ditertibkan pejabat pejabat dibawah bapak kemungkinan ada permainan. maturnuwun bapak	28-07-2019 07:50	Terimakasih laporannya diteruskan ke bidang yg menanganiBerikut prosesnya semoga dapat dipahami : Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan karier baik Promosi dan mutasi jabatan struktural dilakukan dengan menggunakan metode talent scouting.. berdasarkan proses talent scouting tsb, maka bagi PNS yg masuk kategori memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat masuk dalam talentpool. Perlu dimaklumi pada saat proses talent scouting masing-masing peserta membuat pernyataan yg ditandangi oleh masing2 peserta talent scouting disertai materai bahwa Ybs tidak akan menuntut jabatan apabila masuk dalam talentpool. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme promosi dilakukan pertama adalah adanya kekosongan jabatan struktural di unit instansi/SKPD dan selanjut kepala SKPD mengajukan personil untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud. selanjutnya ajuan personil dari masing2 SKPD tsb dibahas dalam Sidang Tim Penilai Kinerja (TPK) yg terdiri dari Sekda selaku Pejabat yang berwenang (Pyb) sekaligus sebagai ketua dan anggota terdiri dari Para Asisten, Inspektur, dan Kepala BKD. Hasil Sidang Tim TPK disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ditetapkan dan dilantik. dengan demikian dapat difahami dalam proses promosi/mutasi jabatan struktural kedudukan BKD sebagai anggota Tim TPK. Terimakasih perhatiannya	Laporan Selesai
54	Maryono (aryonxxxxxxxx)	Saya seorang PNS Guru SMA Pensiun tgl.1 Agustus 2019. Ini sudah akhir Juli yaitu 30 Juli 2019 BELUM TURUN SK PENSIUN. Kami resah & sedih tidak bisa segera mengurus Gaji Pensiun, Taspen dsb. Mohon bantuannya. Terimakasih, wassalamuallaikim wrwb.	30-07-2019 11:36	terimakasih mohon dapat kirim data ke no WA 08112777346 Nama, Nip, SKPDNjih Terimakasih masukannya. setelah kami cek data yg ada ada beberapa SK pensiun bulan Juni sd Juli yg belum selesai. Hal tersebut terjadi karena 1. SKPD terlambat menyampaikan data 2. Pertimbangan BKN belum turun	Laporan Selesai

07 | Juli

2019

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2019

Source: laporgub.jatangprov.go.id



highcharts.com

No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	6
5	Perlu Tindakanjnt	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		6